

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis pendanaan program sanitasi di Provinsi Sumatera Barat tahun 2024, total anggaran untuk pengelolaan persampahan mencapai Rp143.049.925.421, di mana Rp142.407.925.421 bersumber dari Pemerintah dan Rp647.000.000 berasal dari sumber Non-Pemerintah. Berdasarkan anggaran tersebut dari total 19 Kabupaten/Kota, terdapat 6 Kabupaten/Kota yang tergolong dalam kategori cukup, 4 Kabupaten/Kota dalam kategori baik, dan 9 Kabupaten/Kota dalam kategori sangat baik.

Selanjutnya, untuk pendanaan air limbah domestik, total anggaran yang dialokasikan adalah sebesar Rp199.083.675.139, dengan rincian sebanyak Rp146.491.537.890 berasal dari APBD Kabupaten/Kota, Rp47.687.320.400 dari APBN, dan Rp4.304.816.845 dari APBD Provinsi. Dari 19 Kabupaten/Kota terdapat, 6 Kabupaten/Kota berada dalam kategori cukup, 4 Kabupaten/Kota dalam kategori baik, dan 9 Kabupaten/Kota dalam kategori sangat baik.

Berdasarkan laporan dokumen RSP Sumatera Barat, pendanaan program sanitasi di Provinsi Sumatera Barat menunjukkan kinerja yang memuaskan, dengan mayoritas Kabupaten/Kota berada dalam kategori baik dan sangat baik. Meskipun pendanaan program sanitasi di Provinsi Sumatera Barat menunjukkan hasil yang baik, namun dilapangan masih terdapat kendala signifikan yang perlu diatasi. Permasalahan pengelolaan sampah mencakup kurangnya regulasi yang jelas, minimalnya kampanye publik dan pelatihan serta ketergantungan pada APBD.

## 5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan mengenai hasil analisis pendanaan program sanitasi di Provinsi Sumatera Barat tahun 2024, maka saran yang dapat diberikan mengenai Program sanitasi di Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas: Diperlukan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana sanitasi. Hal ini dapat dilakukan dengan menyediakan laporan keuangan yang jelas dan mudah diakses oleh publik, sehingga masyarakat dapat memantau penggunaan anggaran.
2. Penguatan Kerjasama dengan Sektor Swasta: Mengingat kontribusi dari sumber Non-Pemerintah, terutama Corporate Social Responsibility (CSR), penting untuk memperkuat kerjasama dengan sektor swasta. Program kemitraan yang lebih terstruktur dapat meningkatkan dukungan pendanaan dan inovasi dalam pengelolaan sanitasi.
3. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia: Untuk memastikan efektivitas program sanitasi, perlu dilakukan pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi petugas pengelola sanitasi di tingkat Kabupaten/Kota. Hal ini akan membantu dalam implementasi program yang lebih baik dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
4. Evaluasi dan Monitoring Berkala: Disarankan untuk melakukan evaluasi dan monitoring secara berkala terhadap program sanitasi yang telah dilaksanakan. Hal ini bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dan mengevaluasi dampak dari pendanaan yang telah dialokasikan.

5. Peningkatan Kesadaran Masyarakat: Masyarakat perlu diberikan edukasi mengenai pentingnya sanitasi yang baik dan bersih. Program sosialisasi yang efektif dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan dan mendukung program sanitasi yang ada.
6. Diversifikasi Sumber Pendanaan: Untuk mengurangi ketergantungan pada sumber pendanaan tertentu, perlu dilakukan diversifikasi sumber pendanaan, termasuk eksplorasi potensi pendanaan dari lembaga internasional atau donor yang peduli terhadap isu sanitasi.

